

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN
VALUE FOR MONEY PADA PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI**

ISNA ARDILA

(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

AYU ANINDYA PUTRI

(Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Surel: na3_dila@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan pendekatan *value for money* (VMM), yaitu dengan pengukuran 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas). Hasil penelitian menunjukkan untuk tingkat ekonomis selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 102.27%, tetapi peningkatan yang terjadi membuat rasio tidak memenuhi standar ekonomis *value for money*. Tingkat efisiensi selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 107.69%, rasio berada di atas 100% sehingga untuk rasio efisiensi tidak memenuhi standar efisien *value for money*. Rasio efektivitas selama 4 tahun terakhir sudah memenuhi standar sehingga menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah efektif dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, tetapi tetap diperlukan adanya peningkatan pelayanan agar efektivitas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tercapai lebih baik lagi.

Kata kunci: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangannya melalui perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari sisi input, output, outcome, impact, dan benefitnya. Penilaian kinerja keuangan sangatlah penting dilaksanakan

untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melaksanakan program kerjanya dengan baik. Untuk menilai kinerja keuangannya, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi diharapkan agar dapat memperhatikan *Value For Money* dalam menjalankan aktivitasnya.

Value For Money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Konsep *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep *value for money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Menurut Mahmudi (2007) dalam Halim dan Kusufi (2013:132) VFM juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya.

VFM merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for money* menurut *Audit Commission* dalam *Final Report* yang disampaikan oleh ITAD, dalam jurnal berjudul *Measuring the Impact and Value For Money of Governance dan Conflict Programmes* (Chris Barnett, dkk 2010 dalam Laode Kadafi 2013) mengungkapkan “*VFM is about obtaining the maximum benefit over time with the resources available. It is about achieving the right local balance between economy, efficiency and effectiveness, or, spending less, spending well and spending wisely to achieve local priorities. VFM is high when there is an optimum balance between all three elements, when costs are relatively low, productivity is high and successful outcomes have been achieved.*”

Value For Money yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi diukur dengan persentasi rasio tertentu, jika diperoleh nilai rasio $x > 100\%$ menunjukkan kondisi yang tidak diharapkan, $x = 100\%$ berarti berimbang, dan $x < 100\%$ berarti menunjukkan kondisi yang diharapkan (Hadi 2010; Mahsun dalam Puspitasari 2006). Artinya jika persentasi dibawah 100% maka perusahaan dikatakan efisien, efektif dan ekonomis.

Pengukuran Anggaran Belanja Negara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2010 sampai dengan 2013 dengan pendekatan *value for money* terlihat pada tabel 1. Tingkat ekonomis menunjukkan kondisi bahwa pada tahun 2011 dan 2013 sebesar 100.85% dan 102.27% artinya angka ini mengungkapkan bahwa kinerja masih belum baik. Persentasi tingkat ekonomis yang menunjukkan peningkatan selama empat

tahun dapat diartikan semakin tidak ekonomisnya kinerja keuangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam menjalankan program kerjanya.

Tabel 1
Pengukuran *Value For Money*

Rasio	2010	2011	2012	2013	Standar VFM
Ekonomis	92.63%	100.85%	98.75%	102.27%	$\leq 100\%$
Efisiensi	97.61%	100.72%	98.99%	107.69%	$\leq 100\%$
Efektivitas	72.01%	72.25%	71.99%	72.05%	$\leq 100\%$

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur sejauhmana anggaran yang direncanakan mampu direalisasikan dengan baik, jika persentasi yang dihasilkan lebih dari 100% maka realisasi lebih besar dari anggaran. berarti selama empat tahun mengalami peningkatan terutama pada tahun 2011 dan 2013 tingkat rasio efisiensi sebesar 100.72% dan 107.69%, kondisi ini mengungkapkan bahwa tidak terjadi efisiensi pada tahun tersebut

Untuk rasio efektivitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan instansi dalam menjalankan program kerjanya untuk memberikan pelayanan jasa dan kepuasan masyarakat selama empat tahun sudah memenuhi standar VFM. Rasio efektivitas selama empat tahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat menjalankan program kerjanya dengan baik dan memuaskan masyarakat dalam pelayanan jasanya.

Kerangka Berfikir

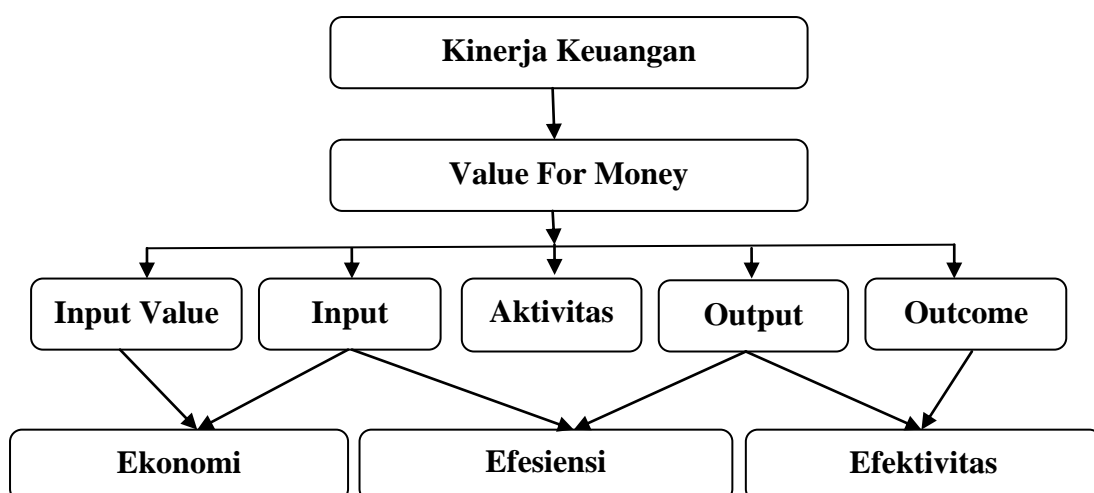
Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) adalah *Value For Money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Mardiasmo (2009) dalam Halim dan Kusufi (2013:133) ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan. Ekonomi sebagai perbandingan antara input skunder (bahan baku, personel, dan infrastruktur) dengan input primer (kas). Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya, apabila di atas anggaran maka terjadi pemborosan.

Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Organisasi sektor publik dinilai semakin efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar rasio,

maka semakin tinggi tingkat efesiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya (Nordriawan dan Hertianti 2011: 161). Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (*output/ input*) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Muindro Renyowijoyo 2008: 7).

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur *outcome* (Halim dan Kusufi 2013:134).

Value For Money yang merupakan alat untuk menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh tujuan yang diharapkan. Konsep *Value For Money* lebih dikenal dengan konsep 3E yaitu Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. *Value For Money* menjelaskan hubungan yang optimal antara biaya/sumber daya serta manfaat/ hasil yang disampaikan melalui proses yang mengubah *input* melalui aktivitas kegiatan menjadi *output* yang diperlukan untuk memicu hasil (*outcome*) yang baik. Oleh karena itu untuk mengukur seberapa ekonomis, efisiensi dan efektivitasnya kinerja keuangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan menggunakan pendekatan *value for money* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE

Kinerja keuangan merupakan penggambaran keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, yaitu dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Penilaian kinerja dengan menggunakan konsep *value for money*.

1. Ekonomis, merupakan perbandingan antara masukan yang terjadi (*input*) dengan nilai masukan yang seharusnya (nilai *input*). Ekonomis dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100 \%$$

2. Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu (*input*) atau penggunaan masukan terendah. Efisiensi dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 \%$$

3. Efektifitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektifitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcomes}}{\text{Output}} \times 100 \%$$

HAIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran *value for money* dihitung dengan menggunakan anggaran belanja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi periode 2010 sampai dengan 2013. Berikut target dan realisasi anggaran belanja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama empat tahun:

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara
Satuan Kerja Melalui KPPN
(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	%Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
2010	2.709.282.000	100%	2.509.665.096	92.63%
2011	2.691.801.000	100%	2.714.800.623	100.85%
2012	3.182.242.000	100%	3.142.321.644	98.75%
2013	5.504.331.000	100%	5.629.099.936	102.27%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2010 sampai dengan 2013

Tabel 3
Kinerja Keuangan PN Tebing Tinggi dengan VFM

<i>Value For Money</i>	2010	2011	2012	2013	Standar Rasio VFM
Ekonomis	92.63%	100.85%	98.75%	102.27%	≤100%
Efisiensi	97.61%	100.72%	98.99%	107.69%	≤100%
Efektivitas	72.05%	72.25%	71.99%	72.05%	≤100%

Dari tabulasi data diketahui bahwa program kerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 4 (empat) tahun terakhir belum bisa dikatakan ekonomis, karena pada tahun 2011 dan tahun 2013 dalam melaksanakan program kerjanya dengan anggaran belanja sebesar Rp.2.691.801.000 dan Rp.5.504.331.000, dimana dalam pelaksanaannya dengan *output* 99.49% dan 99.76% menghabiskan dana sebesar Rp.2.714.800.623 dan Rp.5.629.099.936. hasil perhitungan rasio ekonomis sebesar 100.85% dan 102.27% menunjukkan hasil lebih dari 100% yang berarti tidak ekonomis dalam standar *value for money*. Hal ini terjadi karena adanya pemborosan dana anggaran belanja yang didominasi oleh belanja pegawai. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa rasio ekonomis mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi membuat rasio ekonomis berada diatas 100% (>100%) sehingga menunjukkan selama empat tahun Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak ekonomis dalam pemanfaatan anggaran belanjanya.

Rasio efisiensi dalam menilai program kerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 4 (empat) tahun terakhir belum bisa dikatakan efisien, karena pada tahun 2011 dan tahun 2013 dengan *input* sebesar 100.85% dan 102.27% hanya mencapai *output* sebesar 99.49% dan 99.76% menunjukkan bahwa dengan untuk mencapai *output* yang maksimal dengan dana anggaran yang cukup besar. Hasil perhitungan rasio efisiensi pada tahun 2011 dan 2013 sebesar 100.72% dan 107.69% menunjukkan hasil lebih dari 100% yang berarti tidak efisien dalam standar *value for money*. Hal ini terjadi karena adanya pemborosan dana anggaran belanja yang didominasi oleh belanja pegawai, sehingga menunjukkan penggunaan anggaran belanja negara tidak tepat guna atau tidak tepat sasaran untuk memaksimalkan program kerja. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa rasio ekonomis mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi membuat rasio ekonomis berada diatas 100% (>100%) sehingga menunjukkan selama empat tahun Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak efisien dalam pemanfaatan anggaran belanjanya.

Pada rasio efektivitas selama empat tahun sudah dapat dikatakan efektif, karena rasio berada di bawah 100% (<100%) atau sudah memenuhi standar. Pada tabel 3 dapat dilihat rasio efektivitas mengalami peningkatan selama empat tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya, dan dapat memberikan kepuasan pelayanan jasa hukum terhadap masyarakat. Meskipun dapat memuaskan masyarakat tetap harus meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini perlu adanya evaluasi pelayanan agar dapat terus meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Karena efektivitas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan meningkat apabila kepuasan masyarakat meningkat terhadap pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

SIMPULAN

Pada tahun 2010 sampai dengan 2013, analisis rasio ekonomis mengalami peningkatan sebesar 102.27% berada diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja negara tidak ekonomis karena belum memenuhi standar ekonomis VFM. Analisis rasio efesiensi mengalami peningkatan sebesar 107.69% berada diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi menyebabkan rasio tidak memenuhi standar efisien VFM dan menunjukkan bahwa dalam penggunaan dana anggaran belanja untuk mencapai program kerjanya masih belum tepat guna. Sedangkan pada rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 72.05% berada dibawah 100%, sudah memenuhi standar efektivitas. Rasio efektivitas mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang diberikan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah terpenuhi.

Dengan demikian instansi diharapkan dapat lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja negara, sehingga tidak terjadi lagi pemborosan dana yang melebihi dari target yang telah diberikan, dapat mengefesiesikan anggaran belanjanya dengan baik, sehingga lebih tepat dalam penggunaan dana yang diberikan oleh negara dan tidak terjadi penggunaan dana yang berlebihan untuk menjalankan program kerjanya. Instansi juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanannya, sehingga dengan *output* yang cukup besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, karena efektivitas suatu program dapat meningkat apabila masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim dan Syam Kususfi, (2013) Akuntansi Sektor Publik. Jakarta, Salemba Empat.
- Arizona, Hadi, (2010) Analisis Value For Money untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang, Universitas Brawijaya.
- Ayu, Febriyanti Puspitasari, (2012), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011, *Jurnal Universitas Brawijaya*.

- Deddi, Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, (2011). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Laode, Kadafi, (2013). pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money pada Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*.
- Mahmudi, (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. UII Press.
- Mardiasmo, (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Muindro, Renyowijoyo, (2008). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.